

SKRIPSI

PENGARUH PERTUMBUHAN DAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2001-2016

NURUL IZZA



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

PENGARUH PERTUMBUHAN DAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2001-2016

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NURUL IZZA
A11113013**



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

PENGARUH PERTUMBUHAN DAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2001-2016

disusun dan diajukan oleh

NURUL IZZA
A11113013

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 14 November 2017

Pembimbing I



Dr. Agusssalim, S.E., M.Si.
NIP 196708171991032006

Pembimbing II



Dr. Nursini, S.E., M.A.
NIP 196607171991032001



Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, M.A., Ph.D.
NIP 196108061989031004

SKRIPSI

PENGARUH PERTUMBUHAN DAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2001-2016

disusun dan diajukan oleh

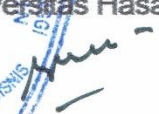
NURUL IZZA
A11113013

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **14 November 2017** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. Agussalim, S.E., M.Si.	Ketua	1. 
2. Dr. Nursini, S.E., M.A.	Sekretaris	2. 
3. Prof. Marsuki, DEA. Ph.D.	Anggota	3. 
4. Dr. Sabir, SE., M.Si.	Anggota	4. 
5. Dr. Hj. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si.	Anggota	5. 



Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, M.A., Ph.D
NIP 19610806 198903 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : NURUL IZZA
NIM : A 111 13 013
Jurusan/program studi : ILMU EKONOMI / STRATA 1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**PENGARUH PERTUMBUHAN DAN KETIMPANGAN
PEMBANGUNAN EKONOMI TERHADAP PEMBANGUNAN
MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2001-2016**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 14 November 2017
Yang membuat pernyataan,



NURUL IZZA

PRAKATA



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Beriring ucapan Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan hanya untuk Allah SWT yang tidak henti-hentinya memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, serta atas izin-Nya pulalah peneliti mampu mengenyam pendidikan hingga memperoleh gelar Sarjana. Salam beriring shalawat semoga tetap tercurahkan kepada kekasih-Nya Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia, suri teladan dari sang pemimpin sejati yang setiap perkataan bahkan perbuatannya menjadi sunnah bagi ummatnya hingga akhir zaman.

Usaha dan upaya telah peneliti kerahkan secara maksimal dalam penulisan skripsi ini, tetapi peneliti mengakui bahwa skripsi ini tidak akan mampu terbit tanpa bantuan dan dukungan dalam segala hal. Terimakasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya secara khusus kepada kedua orangtua, **H. Mukrimin** dan **Hj. Ernawati**, serta saudara/i peneliti, yang tak henti-hentinya mendoakan peneliti agar senantiasa dalam kebaikan, memberikan dukungan secara moril maupun materil, mencurigai peneliti terlalu santai sehingga masa studi harus bertambah satu semester, serta segala jenis tekanan dan desakan sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dengan predikat *Cum Laude*. Dalam kesempatan ini, peneliti juga merasa wajib hukumnya menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga atas bantuan beberapa pihak, yakni kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gagaring Pagalung, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas beserta jajarannya.

2. Bapak Drs. Muh. Yusri Zamhuri, MA, Ph.D. selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas beserta jajarannya. Terima kasih atas segala nasehat dan bantuan yang telah diberikan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
3. Bapak Prof. Marsuki, DEA, Ph.D. selaku Penasehat Akademik peneliti. Terima kasih atas segala nasehat telah diberikan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
4. Bapak Dr. Agussalim, S.E., M.Si. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Nursini, S.E., M.A. selaku Pembimbing II. Terima kasih telah bersedia dan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan, serta memantik peneliti untuk membaca dan belajar lebih banyak agar nyambung saat berdiskusi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Dosen penguji: Bapak Prof. Marsuki, DEA, Ph.D., Bapak Dr. Sabir, S.E., M.Si. dan Ibu Dr. Hj. Sri Undai Nurbayani, S.E., M.Si. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan serta saran dan kritik-konstruktif yang diberikan kepada peneliti demi kelayakan skripsi ini.
6. Prof. Dr. W.I.M. Poli, Dr. H. Abd. Hamid Paddu, MA., Dr. Agussalim, S.E., M.Si., Dr. Hj. Fatmawati, S.E. M.Si., Dr. Sultan Suhab, S.E. M.Si., dan Mirzalina Zaenal, S.E., M.E. sosok dosen favorit dan inspiratif bagi peneliti selama berkuliah. Terima kasih telah menepis rasa putus asa peneliti berkuliah di jurusan ini dan membangkitkan harapan bahwa suatu hari peneliti juga bisa sehebat bapak ibu.
7. Pimpinan dan seluruh karyawan(i) Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan serta institusi-institusi lain yang memberikan sumbangsih berupa penyediaan data dalam penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh peneliti terdahulu yang telah disebutkan dalam daftar pustaka skripsi ini, terima kasih telah memberikan modal intelektual sebagai sumbangsih yang begitu besar dalam penyusunan skripsi ini.
9. SKARLA (Filzah, Azmi, Imma, Wiryana dan Lin), sahabat peneliti selama dibangku SMP hingga hari ini. Terimakasih sudah jadi paling HITS satu sekolahan, mengeksploitasi peneliti menjadi *bodyguard* dan pengeksekusi tugas kelompok. Semoga semuanya bisa sarjana, selalu dalam lindungan-Nya dan secepatnya dipertemukan dengan jodohnya, Aamiin.
10. Ima, Pitty, Kiki, Nanny dan Ummu, sahabat peneliti selama dibangku SMK hingga hari ini. Terimakasih sudah jadi paling HITS *se-cluster* bisnis dijamannya. Semoga selalu dalam lindungan-Nya dan secepatnya dipertemukan dengan jodohnya, Aamiin.
11. Keluarga besar Pengurus OSIS/MPK periode 2011-2012. Mereka yang menjadikan sekolah serasa rumah dan membuat peneliti selalu ingin mengulang masa-masa SMK, membangun kepercayaan diri dan rasa kemanusiaan dihati peneliti, serta senantiasa menghibur dan berbalas rindu disela-sela penatnya kegiatan mahasiswa.
12. SISTA-SISTA: Shira, duluan selaku yang tertua, karakter hampir sama tidak suka rempong dan tidak suka ngaret; Putri, jiwa arsitek yang harus terbelenggu oleh kurva ekonomi, tidak mudah marah tapi mudah bikin malu, peneliti mengakui banyaknya dosa dan khilaf kepada beliau; Muthya, predikat terbaper resmi disandangnya, cucu Kiai yang mendedikasikan seluruh kuotanya untuk jadi *fangirl* sejati, peneliti mengakui salah/khilaf kepada beliau masih batas wajar; Mini, terimut se-lkatan Mahasiswa Indonesia, saking imutnya peneliti sulit menemukan titik temu saat berbicara dengannya, peneliti mengakui salah/khilaf kepada beliau hanya sebatas

bercanda; Merlyn, hidupnya selalu butuh dukungan bahkan soal ibadah, oleh karena itu peneliti mendoakan semoga paling segera bertemu jodohnya; Tifa, dua tahun berumah tangga dengannya membuat peneliti menyadari mungkin kalau Maudy Ayunda tiap *weekday* tidak mandi, tidurnya sambil *breakdance* dan sarapannya selalu telat sampai sore, 100% mereka kembar identik; Nanda, berhak atas predikat tercantik dan termanja *se-group*, tak apalah saingannya juga cuma lima belas orang; Puput; jiwa seni yang mengalir di pembuluh darahnya membuat peneliti geleng-geleng kepala saat ingin menghilangkan penat menatap layar laptop dan mengalihkannya ke layar *timeline* instagram, alhasil peneliti sempat kehilangan ide dalam penyusunan skripsi ini; Septi, anak tunggal yang berusaha mandiri dengan menjadi owner *olshop* jadi seharusnya beliau bergeser ke jurusan sebelah; Fani, sebentar lagi S.E. tapi lebih *expert* jadi agen FBI ketimbang ekonom, penganut mazhab bahwa jodoh itu tersebar dimana-mana; Kiki, berkeyakinan kalau dirinya sangat mirip Alika yang belakangan ini keyakinannya berubah dan lebih memilih menjadi mirip Isyana; Ima, perempuan berhati malaikat yang entah kenapa tuhan takdirkan bertemu dengan kami, semoga tidak ada penyesalan dalam hidupnya; Ida, tulolonna Barru tapi logat seakan ber-KTP DKI, suatu hari akan mengeluarkan karya sebuah buku sastra; Ambar, gadis polos tapi sangat gaul dan menyukai tipe *badboy*, sudah dua bulan jadi S.E. dan sedang merancang pernikahan impiannya; Ayu, paling muda tapi sudah mau jadi Magister, umurnya hanya sebatas angka dan pikirannya selalu berbau yang dewasa-dewasa. Setelah empat tahun mengenal mereka, peneliti hanya mampu untuk berdoa agar kiranya tuhan mau mengampuni dosa yang telah dikerjakan bersama-sama, Aamiin. Pesan peneliti “Mager, *Not Success*”,

13. Teman angkatan SPark'13, yang telah bersama-sama dengan peneliti selama menjadi mahasiswa, maaf kalau banyak salah ucapan dan perbuatan, terima kasih karena pernah terasa solid.
14. Keluarga besar KKN Tematik Desa Sehat Gel. 93 Desa Pallantikang, peneliti merasa bersyukur telah dipertemukan dengan mereka.
15. #RELAWANibuMEGA (Syakira, Jasman, Dadang, Ayu, Uca), tim yang selalu menegakkan bahu dan mengokohkan pundak peneliti. Dikritik tak tumbang, dipuji tak melayang, panjang umur Relawan Ibu Mega.
16. Untuk semua tempat belajar bagi peneliti: OSIS SMKN 1 Bulukumba, SEMA FEB-UH, HIMAJIE FEB-UH, KKMB komisariat Unhas, LOKAL (LKTM FEB-UH Angkatan 2015), Kelas Penelitian HIMAH FISIP-UH.
17. Semua sahabat, guru, dosen, kawan berpikir serta seluruh pihak yang berjasa dan turut andil dalam penyusunan skripsi ini namun belum sempat peneliti sebutkan.

Akhirnya, dengan segala hormat dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan mengharap adanya kritik serta saran yang membangun karena peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari predikat sempurna. Apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab peneliti bukan para pemberi bantuan.

Makassar, 14 November 2017

Nurul Izza

ABSTRAK

PENGARUH PERTUMBUHAN DAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2001-2016

THE EFFECT OF GROWTH AND DISPARITY OF ECONOMIC DEVELOPMENT ON HUMAN DEVELOPMENT IN SOUTH SULAWESI 2001-2016

Nurul Izza
Agussalim
Nursini

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antardaerah terhadap pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data *time series* dari tahun 2001-2016 yang dianalisis menggunakan metode analisis jalur (*Path Analysis*) dan Indeks Williamson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode penelitian, 72 persen variasi variabel pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antardaerah mampu menjelaskan variabel pembangunan manusia, sedangkan 28 persen sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model estimasi. Variabel pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan antardaerah dan variabel ketimpangan pembangunan antardaerah terhadap pembangunan manusia masing-masing berpengaruh positif dan signifikan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui ketimpangan pembangunan antardaerah.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Antardaerah, Pembangunan Manusia

This research aims to measure and analyze the effect of economic growth and regional development disparities on human development in South Sulawesi. This study used secondary data in the form of time series from 2001-2016 which analyzed by Path Analysis method and Williamson Index. The result shows during the period of this research, 72 percent variation in economic growth and regional development disparities variables were able to explain human development variable, while the remaining 28 percent were influenced by other factors beyond the estimation model. The variable of economic growth to regional development disparities and the variable of regional development disparities to human development respectively have positive and significant effect. Economic growth have positive and significant effect on human development either directly or indirectly through the regional development disparities.

Keywords: *Economic Growth, Regional Development Disparities, Human Development*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 7
2.1. Landasan Teori	7
2.1.1. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Regional .	7
2.1.2. Ketimpangan Pembangunan Daerah	11
2.1.3. Pembangunan Manusia	13
2.1.4. Hubungan Teoritis Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi terhadap Pembangunan Manusia.....	16
2.2. Studi Empiris	19
2.3. Kerangka Konseptual	20
2.4. Hipotesis	21
 BAB III METODE PENELITIAN	 23
3.1. Lokasi Penelitian	23
3.2. Jenis dan Sumber Data	23
3.3. Metode Analisis	23
3.3.1. Analisis Jalur	23
3.3.2. Indeks Williamson	24
3.4. Uji Kesesuaian (<i>Goodness of Fit</i>)	25
3.5. Defenisi Operasional	26
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 27
4.1. Kondisi Demografis Lokasi Penelitian	27
4.2. Perkembangan Variabel Penelitian	29
4.2.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2016	29
4.2.2. Perkembangan Ketimpangan Pembangunan Antardaerah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2016	30

4.2.3. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2016	32
4.3. Analisis Hasil	33
4.3.1. Uji Normalitas	34
4.3.2. Uji Kesesuaian	34
4.3.3. Pengujian Hipotesis	35
4.4. Pembahasan	38
4.4.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pembangunan Antardaerah	38
4.4.2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia	39
4.4.3. Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antardaerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia	42
BAB V PENUTUP	45
5.1. Kesimpulan	45
5.2. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan IPM Antara Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2015	4
4.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 dan Tahun 2016	28
4.2 Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2016	33
4.3 Assesment of Normality	34
4.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Antardaerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2016	35
4.5 Hasil Estimasi Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung (<i>Standardied Coefficient</i>)	36
7.1 Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2016	51
7.2 IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2016	52
7.3 Struktur Rata-rata PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016.....	57
7.4 Struktur Rata-rata PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2012-2016	57
7.5 Rata-rata Kontribusi PDRB ADHK 2010 menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2016	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Rata-rata PDRB per Kapita Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2013	3
2.1 Kerangka Konseptual	21
4.1 Pertumbuhan Ekonomi atas dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2016	30
4.2 Perkembangan Ketimpangan Antardaerah (Indeks Williamson) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2016	31
4.3 Kerangka Konseptual dengan Hasil Estimasi	37
7.1 Kondisi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kriteria Tipologi Klassen, 2010-2016	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Indeks Williamson	51
2 IPM Metode Baru (2014)	52
3 Hasil IBM SPSS Amos 22	53
4 Tipologi Klassen	56
5 PDRB Provinsi Sulawesi Selatan	57
6 Biodata	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan wilayah bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat. Hal ini harus diupayakan melalui keseimbangan pembangunan antardaerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Pembangunan wilayah yang strategis dan berkualitas menjadi harapan setiap daerah di Indonesia.

Menurut Arsyad (2010) tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan. Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan, suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari apa yang dicapai pada masa sebelumnya atau dalam konteks wilayah memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten dan kota.

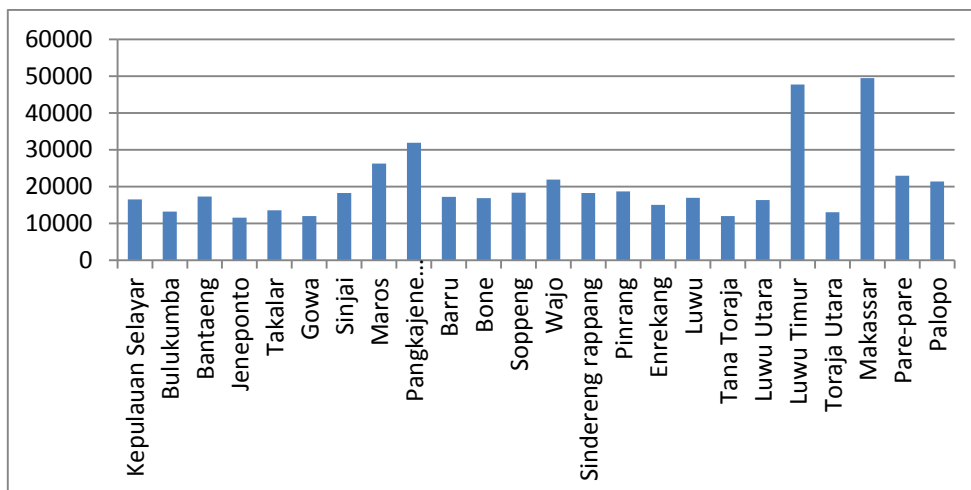
Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata. Terdapat daerah dengan pertumbuhan yang cepat dan daerah dengan pertumbuhan yang lambat (Kuncoro, 2004). Hal ini biasa kita sebut dengan ketimpangan atau ketidakmerataan pembangunan ekonomi antarwilayah yang menurut Sjafrizal (2014) sebenarnya merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat

dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

Pertumbuhan (*growth*) dan pemerataan (*equality*) merupakan dua unsur yang penting dalam proses pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa diantara kedua aspek tersebut seringkali terjadi *trade off* antara satu dan lainnya, yaitu bilamana mendahulukan pemerataan maka akan cenderung memperlambat proses pertumbuhan (Sjafrizal, 2008). Tetapi pemerataan distribusi pendapatan merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah karena Alesina dan Rodrik (1994), menemukan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan akan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemudian akan berdampak buruk juga terhadap pembangunan manusia suatu daerah.

Provinsi Sulawesi Selatan berperan penting sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Peran provinsi Sulawesi Selatan sangat strategis sebagai simpul pertanian, simpul perikanan dan klaster industri. Bukan hal yang mengherankan jika Sulawesi Selatan memiliki prestasi yang membanggakan pada kinerja perekonomiannya yang selalu berada diatas rata-rata nasional (Bappenas, 2015).

Apabila diamati dari besarnya rata-rata PDRB per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada Gambar 1.1 dibawah ini, terlihat jelas bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan. Dari 24 Kabupaten/Kota, tujuh wilayah yang memiliki PDRB per Kapita tertinggi adalah Makassar, Luwu Timur, Pangkep, Maros, Pare-Pare, Wajo dan Palopo.



Gambar 1.1
Rata-Rata PDRB per Kapita Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan
Tahun 2010-2013 (ribu rupiah) (BPS, 2016)

Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan yang cukup tinggi masih dibayangi ketimpangan pembangunan ekonomi antardaerah. Ini terlihat dari besarnya gap antara kabupaten/kota dengan PDRB per kapita tertinggi dan PDRB per kapita terendah. Kecenderungan nilai PDRB per kapita tertinggi didominasi Kota Makassar yang tidak lain merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan, nilai PDRB per kapita terendah masih harus ditanggung oleh Kabupaten Jeneponto yang juga telah ditetapkan sebagai daerah tertinggal oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pembangunan ekonomi daerah seyogyanya tidak berfokus pada peningkatan PDRB dan laju pertumbuhan semata, tetapi juga perlu memperhatikan pemerataan pendapatan dan pembangunan manusia. Menurut Santika (2014) tingkat pembangunan manusia dapat mempengaruhi kemampuan penduduk dalam mengelola berbagai sumber daya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP (*United Nations Development*

Program) telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 1.1
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan IPM
Antara Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2015

Tahun	IPM			
	Nasional	Pertumbuhan (%)	Sul-Sel	Pertumbuhan (%)
2010	66,53	-	66,00	-
2011	67,09	0,84	66,65	0,98
2012	67,70	0,91	67,26	0,91
2013	68,31	0,90	67,92	0,98
2014	68,90	0,86	68,49	0,84
2015	69,55	0,94	69,15	0,96

Sumber: BPS, 2016 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 nilai IPM provinsi Sulawesi Selatan masih berada dibawah rata-rata nasional, tetapi terus mengalami peningkatan dan bertumbuh lebih cepat dibanding nasional meskipun pertumbuhannya cenderung rendah atau masih berada dibawah angka 1%. Bertitik tolak dari kenyataan tersebut memperkuat pendapat Sjafrizal (2008) serta Alesina dan Rodrik (1994), bahwa dalam proses pembangunan seringkali terjadi *trade off* antara pertumbuhan dan pemerataan. Kemudian jika terjadi ketidakmerataan dapat berdampak buruk pada pembangunan manusia suatu daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2016”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antardaerah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2016?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2016?
3. Apakah ketimpangan pembangunan antardaerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2016?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui ketimpangan pembangunan antardaerah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan antardaerah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2016.
2. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2016.
3. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh ketimpangan pembangunan antardaerah terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2016.

4. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia melalui ketimpangan pembangunan antardaerah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Pengambil Kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antardaerah serta pengaruhnya terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan.
2. Ilmu Pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian mengenai pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pembangunan antardaerah, serta indeks pembangunan manusia sehingga bisa menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya terkait dengan masalah yang sama dan bisa dikembangkan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi, tetapi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki makna yang berbeda. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2002). Adanya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di suatu daerah akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Menurut Kuznet dalam Todaro (2003), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas ditentukan oleh kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologi terhadap tuntutan keadaan yang ada. Kuznet dalam Pressman (2000) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan perpaduan efek dari produktivitas yang tinggi dan populasi yang besar. Kuznet sangat menekankan pada perubahan dan inovasi teknologi sebagai cara meningkatkan pertumbuhan produktivitas terkait dengan redistribusi tenaga kerja dari sektor yang kurang produktif (pertanian) ke sektor yang lebih produktif (industri manufaktur).

Menurut Nafziger (1997) dalam Ristiardani (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah penduduk (tenaga kerja), pendidikan, pembentukan modal (investasi dan perkembangan teknologi), kewirausahaan dan sumber daya alam. Negara dengan sumber daya alam yang besar belum tentu memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi begitupun sebaliknya. Adanya faktor lain seperti pertumbuhan penduduk akan mendorong pertumbuhan tenaga kerja. Semakin besar jumlah tenaga kerja akan meningkatkan jumlah output yang dihasilkan dalam perekonomian. Perannya dipengaruhi oleh keterampilan, tingkat pendidikan, dan daya kreasi tinggi yang dimiliki akan cenderung meningkatkan produktivitasnya. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dalam bentuk meningkatnya output yang dihasilkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Todaro (2003) mengemukakan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Ketiga faktor tersebut adalah: (1) akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia; (2) pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja; (3) kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan.

Menurut Schumpeter dalam Pressman (2000) pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara terus-menerus tetapi mengalami keadaan dimana adakalanya berkembang dan dilain waktu mengalami kemunduran. Konjungtur tersebut disebabkan oleh kegiatan para pengusaha (*entrepreneur*) melakukan inovasi atau pembaruan dalam kegiatan mereka

menghasilkan barang dan jasa. Untuk mewujudkan inovasi yang seperti ini, investasi akan dilakukan dan pertambahan investasi ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Proses *multiplier* yang ditimbulkannya akan menyebabkan peningkatan lebih lanjut dalam kegiatan ekonomi dan perekonomian mengalami pertumbuhan yang lebih pesat.

Dalam teori basis ekonomi (*economic base theory*) disebutkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut, kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan non basis. Hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (Tarigan, 2005).

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi (Tarigan, 2005). Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan teknologi), yang secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Tidak dapat disangkal bahwa pertumbuhan ekonomi sudah lama menjadi target utama dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah. Melalui pertumbuhan ekonomi wilayah yang cukup tinggi juga diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun dan dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun (Tambunan, 2003).

Aktivitas pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di suatu negara atau daerah dapat dilihat hasilnya pada dampak yang ditimbulkannya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di negara atau daerah tersebut. Salah satu indikator dimana hasil pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di suatu negara atau daerah dapat dilihat secara langsung adalah pada adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi negara atau daerah yang bersangkutan (Razak, 2009). Namun, perlu digaris bawahi pernyataan para ahli yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari pertambahan Produk Domestik Bruto atau PDRB saja, akan tetapi diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa yang aman dan tentram yang dirasakan masyarakat luas.

Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Kualitas modal manusia ini dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, ataupun indikator-indikator lainnya. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks daerah. Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja ekonominya.

Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi daerah yang berbeda-beda intensitasnya akan menyebabkan terjadinya ketimpangan atau disparitas ekonomi dan ketimpangan pendapatan antardaerah. Myrdal dan Friedman

dalam Solihin (2012) menyebutkan bahwa pertumbuhan atau perkembangan daerah akan menuju pada divergensi.

2.1.2 Ketimpangan Pembangunan Daerah

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah. Ketimpangan merupakan suatu fenomena yang terjadi hampir seluruh lapisan negara di dunia, baik itu negara miskin, negara sedang berkembang, maupun negara maju, hanya yang membedakan dari semuanya yaitu besaran tingkat ketimpangan tersebut, karenanya ketimpangan itu tidak mungkin dihilangkan namun hanya dapat ditekan hingga batas yang dapat ditoleransi.

Menurut Neo-klasik, ketimpangan pembangunan wilayah terjadi karena adanya perbedaan sumberdaya, tenaga kerja, dan modal yang dimiliki oleh tiap daerah adalah berbeda-beda. Hipotesis Neo-klasik yang dianalisis oleh Douglas C. North merupakan dasar teoritis utama terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah. Menurut Hipotesis Neo-klasik tersebut pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antarwilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antarwilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesis ini, dapat disimpulkan sementara bahwa negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan antarwilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antarwilayah adalah berbentuk huruf U terbalik (*reverse U-shape curve*) (Sjafrizal, 2014).

Hipotesis Neo-klasik ini kembali diteliti oleh Jeffrey G. Williamson (1965) dalam Tambunan (2003). Williamson meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih “matang”, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antardaerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Artinya, proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan wilayah, tetapi pada tahap awal pembangunan justru sebaliknya (Harun dan Ghozali, 2012).

Kuznet juga meneliti kesenjangan di berbagai negara secara *cross sectional* dan menemukan pola U terbalik. Kuznet menyimpulkan bahwa pendapatan rata-rata per kapita pada awal perkembangan negara masih rendah, dan tingkat kesenjangan juga rendah. Ketika pendapatan rata-rata naik, maka kesenjangan juga meningkat. Kemudian ketika pendapatan rata-rata naik lebih tinggi, maka kesenjangan akan turun kembali (Todaro, 2004).

Menurut Sjafrizal (2008), faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah: (1) Perbedaan kandungan sumber daya alam; (2) Perbedaan kondisi demografis; (3) Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa; (4) Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah; dan (5) Alokasi dana pembangunan antar wilayah.

Myrdal menjelaskan perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antardaerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effect*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini akan mengakibatkan

ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan pasar secara normal akan cenderung meningkat, sehingga mengakibatkan ketimpangan antardaerah (Arsyad, 2002).

Ekspansi di suatu wilayah mempunyai pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) terhadap wilayah lain atau wilayah disekitarnya. Arus perpindahan tenaga kerja (migrasi), perpindahan modal dan perdagangan merupakan sarana bagi proses kumulatif, mengarah ke atas di daerah yang bernasib baik dan mengarah ke bawah di daerah yang bernasib tidak baik. Karena migrasi itu sifatnya selektif (yaitu dilakukan oleh penduduk yang memiliki kemampuan dan keterampilan), maka cenderung akan menguntungkan daerah atau wilayah yang sedang mengalami ekspansi yang cepat dan merugikan daerah-daerah lainnya. Strategi campur tangan pemerintah yang dikehendaki adalah pengambilan kebijakan yang melemahkan *backwash effects* dan memperkuat *spread effects* yang dengan demikian semakin memperkecil ketimpangan.

2.1.3 Pembangunan Manusia

Definisi pembangunan manusia menurut UNDP adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Artinya, penduduk menjadi tujuan akhir dari pembangunan, sedangkan upaya pembangunan merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi.

Aspek pembangunan manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia. *United Nations Development Program (UNDP)* sejak tahun 1990 mempublikasikan *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini pertama kali dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub Ul Haq seorang ekonom Pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. IPM menyampaikan bahwa pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan manusia dalam arti luas, bukan hanya dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi. Indikator kesenjangan pembangunan dan pemerinkatan yang baik harus memasukkan variabel kesehatan dan pendidikan dalam pengukuran kesejahteraan yang tertimbang, dan bukan hanya melihat tingkat pendapatan saja. IPM merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antarnegara maupun antardaerah (Todaro, 2003).

IPM adalah sebuah indikator komposit yang merupakan ukuran gabungan dari beberapa indikator tunggal, karena indikator tunggal seringkali dirasakan kurang tepat untuk mengukur atau menerangkan beberapa gejala sekaligus. IPM mengukur capaian umum suatu daerah dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu panjangnya usia (diukur dengan angka harapan hidup saat lahir), pengetahuan (diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan kelayakan hidup (diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan). Menurut Elizabeth (2007), IPM telah memainkan dua peran kunci dalam pembangunan ekonomi yang diterapkan: (1) sebagai alat untuk mempopulerkan pembangunan manusia sebagai pemahaman baru tentang

kesejahteraan; dan (2) sebagai alternatif untuk PDB per kapita sebagai cara untuk mengukur tingkat pembangunan untuk perbandingan antarnegara dan antarwaktu.

Menurut Amartya Sen, hakikat dari pembangunan adalah kebebasan dan karena itu, pembangunan harus dapat membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan dan tekanan-tekanan pihak lain. Bagi Sen, kesejahteraan manusia berarti menjadi lebih baik, yang dalam pengertian dasar berarti sehat, menyantap makanan bernutrisi, berpakaian pantas, melek aksara dan panjang umur. Dalam pengertian yang lebih luas, menjadi baik berarti mampu mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat. leluasa bergerak, dan memiliki kebebasan memilih untuk menjadi orang yang diinginkan dan melakukan apa saja yang mungkin. Inilah yang sesungguhnya menjadi inti dari pembangunan manusia. Pandangan Sen membantu untuk menjelaskan mengapa para pakar ekonomi pembangunan telah sangat menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan. Para pakar juga menyimpulkan bahwa negara-negara yang tingkat pendapatannya tinggi tetapi standar kesehatan dan pendidikannya rendah adalah negara yang "tumbuh tetapi tidak berkembang". Alasannya karena adanya hubungan kausalitas dua arah, yakni: dengan pendapatan yang lebih tinggi maka masyarakat dan pemerintah dapat mengeluarkan dana yang lebih besar untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan, dan dengan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik produktivitas dan pendapatan lebih tinggi akan lebih mudah dicapai. Dengan demikian, kesehatan dan pendidikan juga dapat dipandang sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang vital (Todaro, 2009).

2.1.4 Hubungan Teoritis Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pada umumnya untuk mengetahui perkembangan pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Dalam pembahasan ini akan dilihat bagaimana pengaruh pertumbuhan dan ketimpangan pembangunan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pertama, hubungan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pembangunan antardaerah. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan setiap Negara adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mampu memacu perkembangan ekonomi secara makro.

Kuznet menyatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan dengan ketimpangan seperti *U-shaped* terbalik, yaitu dalam jangka pendek ada korelasi positif, namun dalam jangka panjang hubungan tersebut menjadi negatif. Artinya dalam tahap awal pembangunan tingkat ketimpangan akan semakin besar sampai pada tingkat tertentu dan selanjutnya tingkat ketimpangan itu akan semakin menurun (Todaro, 2004)

Pertumbuhan ekonomi daerah berbeda-beda intensitasnya akan menyebabkan terjadinya ketimpangan atau disparitas ekonomi dan ketimpangan wilayah. Myrdal dan Friedman dalam Solihin (2012) menyatakan bahwa pertumbuhan atau perkembangan daerah akan menuju kepada divergensi. Hirschman dalam Solihin (2012) mengemukakan konsep pengembangan wilayah yaitu dalam suatu wilayah atau daerah yang cukup luas hanya terdapat beberapa titik pertumbuhan (*growth center*), dimana industri berada pada suatu kelompok daerah tertentu sehingga menyebabkan timbulnya daerah pusat dan daerah belakang (*hinterland*).

Untuk mengurangi ketimpangan ini perlu memperbanyak titik-titik pertumbuhan baru.

Kedua, hubungan pertumbuhan ekonomi dengan indeks pembangunan manusia. Menurut Midgley (1995), menjelaskan bahwa pembangunan sosial merupakan pendekatan pembangunan secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan sosial tidak dapat berjalan baik tanpa adanya pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi tidaklah bermakna kecuali diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosial dari populasi sebagai suatu kesatuan. Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia, terjaminnya peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Aktivitas pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di suatu negara atau daerah dapat dilihat hasilnya pada dampak yang ditimbulkannya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di negara atau daerah tersebut. Untuk itu diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Namun, hal ini harus diimbangi dengan fungsi distribusi yang melahirkan pemerataan.

Pada tingkat makro, distribusi peningkatan pendapatan dari pertumbuhan ekonomi juga akan memiliki dampak yang kuat pada pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya diarahkan lebih kemasyarakat miskin akan memiliki dampak yang lebih besar pada pembangunan manusia (Ranis, 2004). Meningkatnya

pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan meningkatnya pendapatan, maka kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya menjadi lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam bentuk pendapatan masyarakat mulai meningkat. Pertumbuhan PDB akan mendorong masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik (Lilis dan Yohana, 2012). Karena, menurut Mirza (2012) pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan positif terhadap IPM, yang berarti pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Ketiga, hubungan ketimpangan pembangunan antardaerah dengan indeks pembangunan manusia. Ketimpangan pembangunan antardaerah merupakan suatu hal yang umum terjadi dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografis yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga berbeda. Terjadinya ketimpangan antardaerah ini juga membawa implikasi terhadap tingkat pembangunan manusia antardaerah.

Alesina dan Rodrik (1994) mengemukakan bahwa ketidakmerataan dsitribusi pendapatan akan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemudian akan berdampak buruk juga terhadap pembangunan manusia suatu daerah.

Terjadinya ketimpangan antarwilayah membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antarwilayah juga mempunyai implikasi pula

terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintahan daerah (Sjafrizal, 2008).

Dengan kata lain, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia akan lebih meyakinkan jika memang sudah ada kebiasaan untuk mendukung pendidikan yang baik yang juga ditentukan oleh tahapan pembangunan itu sendiri. Selain itu, pengaruh positif dari pembangunan manusia tersebut akan kuat jika terdapat distribusi pendapatan yang lebih merata, dukungan untuk modal sosial yang lebih baik, serta kebijakan ekonomi yang lebih memadai (Brata, 2005).

Aspek pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata akan berdampak pada membaiknya tingkat kesehatan dan pendidikan serta akan memperbaiki tingkat produktifitas tenaga kerja.

2.2. Studi Empiris

Sebagai acuan dalam penelitian ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, baik berupa pengujian hipotesis maupun pengembangan teori lebih lanjut antara lain:

Sasana, Hadi (2009) menulis tentang “Analisis dampak pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antardaerah dan tenaga kerja terserap terhadap kesejahteraan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dalam era desentralisasi” teknik analisis yang digunakan adalah *least square* dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan

masyarakat sedangkan kesenjangan ekonomi antardaerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kurniasih, Erni Panca (2013) menulis tentang “Ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Barat suatu kajian terhadap hipotesis Kuznet”. Menggunakan teknik analisis regresi sederhana, kesimpulan yang diperoleh ialah pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan wilayah artinya, jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka ketimpangan wilayah berkurang.

Yasa, I Komang dkk. (2015) menulis tentang “Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antardaerah terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali” menggunakan analisis Indeks Williamson dan analisis jalur. Hasil analisis menunjukkan disparitas pendapatan antardaerah Provinsi Bali tahun 2001-2012 mengalami penurunan dan tingkat disparitas tergolong rendah. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan antardaerah, namun berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui disparitas pendapatan antardaerah.

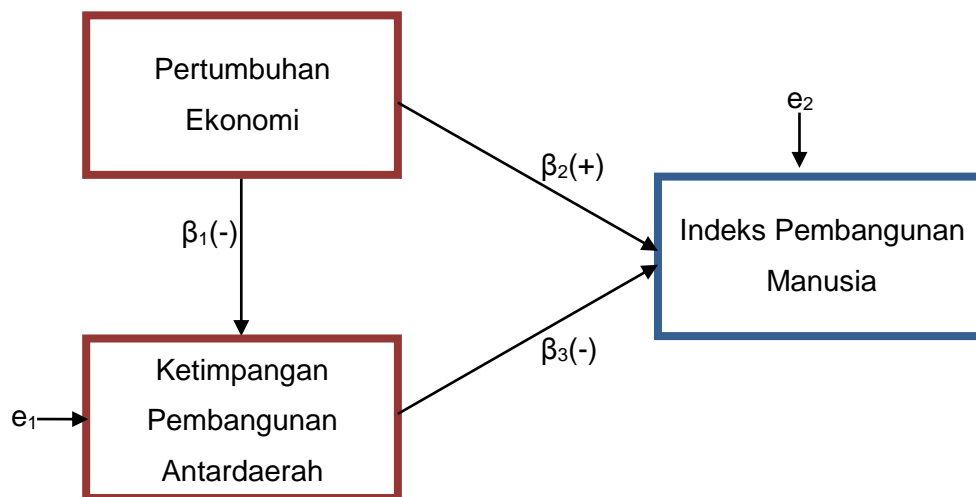
Awandari dkk. (2016) menulis tentang “Pengaruh infrastuktur, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja”. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis jalur, hasilnya ialah pertumbuhan ekonomi secara langsung memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor indeks pembangunan manusia. Faktor-faktor yang akan diteliti yaitu faktor pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antardaerah.

Permasalahan ketimpangan merupakan permasalahan yang banyak dihadapi negara sedang berkembang seperti Indonesia, tidak terkecuali secara khusus ketimpangan pembangunan antardaerah yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari pembangunan manusianya serta pertumbuhan ekonomi dengan pendistribusian yang merata di setiap daerahnya. Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan mendorong pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih merata. Kerangka konseptual diatas dapat disederhanakan dalam Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Berdasarkan teori dan kerangka konseptual yang telah dijabarkan sebelumnya, maka hipotesis yang dimunculkan adalah sebagai berikut:

1. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antardaerah di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2001-2016.

2. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2001-2016.
3. Diduga ketimpangan pembangunan antardaerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2001-2016.
4. Diduga pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia melalui ketimpangan pembangunan antardaerah di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2001-2016.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di lingkup Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. Data tersebut merupakan data *time series* dari tahun 2001-2016. Data yang dikumpulkan berupa data PDRB, PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk Kabupaten/Kota dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan.

3.3 Metode Analisis

3.3.1 Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*). Menurut Sarwono (2007) teknik analisis jalur yang dikembangkan oleh Sewall Right sebenarnya merupakan pengembangan teknik kolerasi yang diurai menjadi beberapa interpretasi akibat yang ditimbulkannya. Analisis jalur memiliki kedekatan dengan regresi berganda, sehingga regresi berganda adalah bentuk khusus analisis jalur. Teknik ini dikenal sebagai model sebab-akibat (*causing modeling*). Penamaan ini didasarkan pada alasan bahwa analisis jalur memungkinkan peneliti dapat menguji proposisi teoritis mengenai hubungan sebab akibat tanpa memanipulasi variabel-variabel.

Bentuk hubungan sebab akibat yang muncul menggunakan model yang cukup kompleks, yaitu adanya variabel yang berperan ganda sebagai variabel independen pada suatu hubungan, tetapi menjadi variabel dependen pada hubungan yang lain. Bentuk hubungan seperti ini membutuhkan alat analisis yang mampu menjelaskan secara simultan, untuk itu digunakan analisis jalur (*path analysis*) (Wibowo, 2005).

Analisis jalur menguji persamaan regresi yang melibatkan beberapa variabel eksogen dan endogen sekaligus sehingga memungkinkan pengujian terhadap variabel *intervening* atau antara. Disamping itu analisis jalur bisa mengukur hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel dalam model. Maka model estimasinya sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2) \quad (1)$$

$$X_2 = f(X_1) \quad (2)$$

$$X_2 = \beta_1 X_1 + e_1 \quad (3)$$

$$Y = \beta_2 X_1 + \beta_3 X_2 + e_2 \quad (4)$$

Keterangan:

Y = Indeks Pembangunan Manusia

X₁ = Pertumbuhan Ekonomi

X₂ = Ketimpangan pembangunan antardaerah (Indeks Williamson)

B₁, β₂, β₃ = Koefisien regresi

e₁, e₂ = *Error term*

3.3.2 Indeks Williamson

Untuk mengetahui kondisi ketimpangan antar wilayah/regional (*regional inequality*) digunakan Indeks Williamson (Kuncoro, 2004) dengan formulasi sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y} \quad (5)$$

Dimana:

IW = Indeks Williamson

Y_i = PDRB per kapita kabupaten i

Y = PDRB per kapita rata-rata provinsi

f_i = Jumlah penduduk kabupaten i

n = Jumlah penduduk provinsi

Indeks Williamson berkisar antara $0 < IW < 1$, dengan kriteria hasil yang digunakan adalah:

$IW < 0,3$ = ketimpangan rendah

$IW 0,3-0,5$ = ketimpangan sedang

$IW > 0.5$ = ketimpangan tinggi

Menurut Sutarno (2003) Indeks Williamson hanya menjelaskan distribusi PDRB per kapita antar kabupaten di satu provinsi tanpa menjelaskan seberapa besar PDRB per kapita yang didistribusikan tersebut dengan PDRB per kapita rata-rata daerah lain.

3.4 Uji Kesesuaian (*Goodness of Fit*)

Uji kesesuaian (*Goodness of Fit*) ialah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah model yang dihipotesiskan merupakan model yang baik untuk merepresentasikan hasil penelitian. Menurut Ghozali (2008), untuk mengetahui apakah model cocok dengan data digunakan kriteria sebagai berikut:

1. *Chi-Square*

Nilai *Chi-Square* dengan nilai *P-values for test of close fit* lebih besar daripada 0,05 ($P > 0,05$) maka model cocok dengan data dan dikatakan fit.

2. *RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation)*

RMSEA digunakan untuk mengukur penyimpangan nilai parameter pada suatu model dengan matriks kovarians. Nilai RMSEA berkisar antara 0,01 sampai dengan 0,08. Nilai RMSEA yang kurang daripada 0,05 ($RMSEA < 0,05$) mengindikasikan adanya model fit. Makin kecil nilainya, maka kecocokan model dengan data makin baik.

3. *GFI (Goodness of Fit Index)*

Goodness of Fit Index (GFI) merupakan suatu ukuran mengenai ketepatan model dalam menghasilkan observed matriks kovariansi. Nilai GFI berkisar antara 0 sampai dengan 1. Nilai GFI yang lebih besar daripada 0,9 ($GFI > 0,9$) menunjukkan fit suatu model yang baik.

3.5 Definisi Operasional

Batasan untuk setiap variabel dalam penelitian ini antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita secara terus menerus dalam jangka panjang. Dalam penelitian ini diukur dengan laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan harga konstan tahun 2010, periode 2001-2016 yang dinyatakan dalam satuan persen.
2. Ketimpangan Pembangunan Antardaerah adalah ketidakmerataan pembangunan pada tingkat Kabupaten/Kota yang diukur dengan Indeks Williamson periode 2001-2016. Indeks Williamson dihitung berdasarkan PDRB per kapita dan jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Indeks Pembangunan Manusia adalah kemajuan hidup manusia dalam keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan dasar yang diukur dengan IPM di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2001-2016.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Demografis Lokasi Penelitian

Provinsi Sulawesi Selatan berperan penting sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia, bahkan sebagai *centre point of Indonesia*. Peran Provinsi Sulawesi Selatan sangat strategis dalam mendukung Pulau Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta pertambangan nikel. Khususnya sebagai simpul pertanian pangan, simpul perikanan, dan klaster industri. Hal ini sejalan dengan visi Sulawesi Selatan yaitu *“Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional dan simpul jejaring akselerasi kesejahteraan”*. Selain itu, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki pelabuhan dan Bandar udara internasional serta menjadi titik awal Trans Sulawesi yang semakin meningkatkan posisi strategisnya.

Dari sisi demografi, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Total jumlah penduduk pada tahun 2016 tercatat sebanyak 8.606.375 jiwa. Kota Makassar menjadi wilayah dengan populasi tertinggi di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.469.601 jiwa. Sedangkan, Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi wilayah dengan populasi terendah di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 131.605 jiwa.

Tabel 4.1
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 dan Tahun 2016

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)		Jumlah Penduduk (Jiwa)		Kepadatan Penduduk per km ²	
		2008	2016	2008	2016	2008	2016
1	Kepulauan Selayar	903.50	1,199.91	119.811	131.605	133	144
2	Bulukumba	1,154.67	1,170.10	390.543	413.229	338	355
3	Bantaeng	395.83	397.06	172.849	184.517	437	463
4	Jeneponto	903.35	837.99	332.334	357.807	368	394
5	Takalar	566.51	620.26	255.154	289.978	450	506
6	Gowa	1,883.32	1,802.08	605.876	735.493	322	384
7	Sinjai	819.96	924.15	225.943	239.689	276	290
8	Maros	1,619.12	1,538.44	303.211	342.890	187	210
9	Pangkep	1,112.29	814.95	295.137	326.700	265	291
10	Barru	1,174.71	1,192.39	161.732	171.906	138	146
11	Bone	4,559.00	4,593.38	705.717	746.973	155	163
12	Soppeng	1,359.44	1,337.99	229.502	226.305	169	166
13	Wajo	2,506.20	2,394.15	378.512	394.495	151	157
14	Sidrap	1,883.25	2,081.01	250.666	292.985	133	154
15	Pinrang	1,961.17	1,892.42	346.988	369.595	177	187
16	Enrekang	1,786.01	1,821.41	188.070	201.614	105	112
17	Luwu	3,000.25	2,940.51	324.229	353.277	108	117
18	Tana Toraja	2,054.30	2,149.67	234.534	230.195	144	111
19	Luwu Utara	7,502.68	7,365.51	313.674	305.372	42	40
20	Luwu Timur	6,944.88	7,315.77	230.821	281.822	33	40
21	Toraja Utara	1,151.47	1,169.95	226.478	226.988	197	196
22	Makassar	175.77	181.35	1.253.656	1.469.601	7,132	8,246
23	Pare Pare	99.33	88.92	117.591	140.423	1,184	1,396
24	Palopo	247.52	254.57	141.996	172.916	574	682
Sulawesi Selatan		45,764.53	46,083.94	7.805.024	8.606.375	171	187

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 dan 2017

Tabel 4.1 menunjukkan data perbandingan populasi dan tingkat kepadatan di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008 dan tahun 2016. Kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 171 jiwa/km² pada tahun 2008 dan meningkat menjadi 187 jiwa/km² pada tahun 2016. Daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi masih terpusat di Kota Makassar sebagai ibukota provinsi yakni sebesar 7.132 jiwa/km² pada tahun 2008 dan meningkat menjadi 8.246 jiwa/km² pada tahun 2016. Sedangkan, tingkat kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Luwu Timur sebesar 33 jiwa/km² pada tahun 2008 dan meningkat menjadi 40 jiwa/km² pada tahun 2016.

4.2 Perkembangan Variabel Penelitian

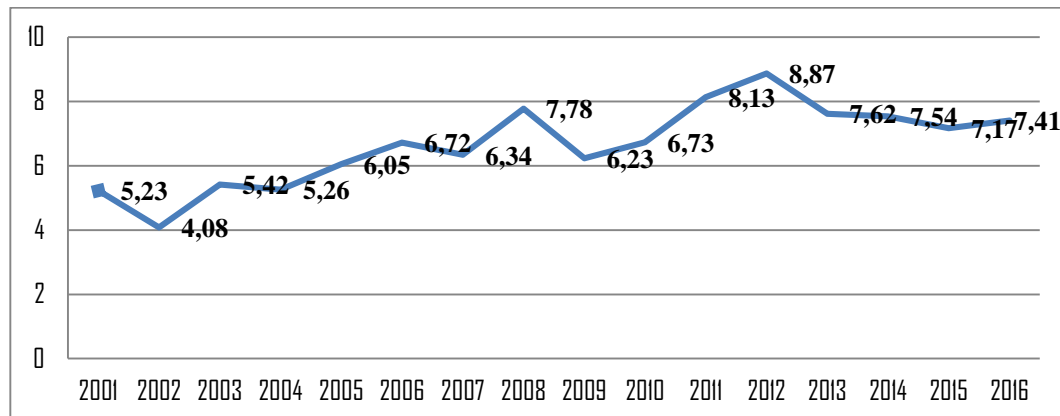
4.2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2001-2016

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah atau negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Dalam penelitian ini dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dicapai dan dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan PDB atau PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Data pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan ditunjukkan pada Gambar 4.1. Data tersebut berfluktuatif namun tetap menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan persentase

pertumbuhan sebesar 8.87%, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2002 dengan persentase pertumbuhan sebesar 4.08%.



Gambar 4.1
Pertumbuhan Ekonomi atas dasar Harga Konstan Tahun 2010
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2016 (BPS, 2017)

4.2.2 Perkembangan Ketimpangan Pembangunan Antardaerah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2016

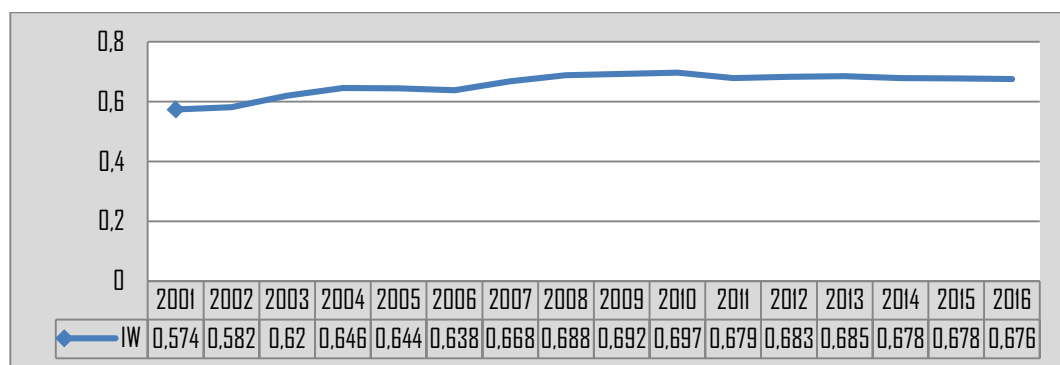
Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata. Terdapat daerah dengan pertumbuhan yang cepat dan daerah dengan pertumbuhan yang lambat (Kuncoro, 2004). Hal ini biasa kita sebut dengan ketimpangan atau ketidakmerataan pembangunan ekonomi antarwilayah. Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

Ketimpangan pembangunan yang terjadi di setiap daerah merupakan suatu hal penting yang harus di perhatikan untuk mencegah dan mengurangi masalah-masalah yang terjadi karena adanya ketimpangan tersebut. Setiap

daerah dituntut untuk mampu mengelola potensi daerah yang mereka miliki secara tepat agar dapat mendorong terciptanya proses pembangunan dengan tingkat pertumbuhan yang baik disertai dengan tingkat pemerataan yang baik pula.

Indeks Williamson merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur ketimpangan suatu wilayah. Hasil dari perhitungan Indeks Williamson akan menunjukkan seberapa timpang daerah tersebut dengan angka indeks antara nol sampai dengan satu. Jika hasil perhitungan Indeks Williamson semakin mendekati angka satu, maka ketimpangan yang terjadi juga semakin tinggi dan sebaliknya jika angka mendekati nol, maka ketimpangan yang terjadi di daerah tersebut semakin rendah.

Data hasil perhitungan Indeks Williamson untuk Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2016 dapat dilihat pada Gambar 4.2. Berdasarkan data yang tersedia, terjadi kenaikan yang signifikan (semakin timpang) pada tahun 2002 ke 2003 dari 0.58 ke 0.62. Sedangkan pada tahun 2008-2016 cenderung fluktuatif di kisaran 0.67-0.69. Dari nilai Indeks Williamson yang menunjukkan angka >0.5 , maka Provinsi Sulawesi Selatan dapat diklasifikasikan dalam kriteria ketimpangan tinggi.



Gambar 4.2
Perkembangan Ketimpangan Antardaerah (Indeks Williamson)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2016 (BPS 2017, diolah)

4.2.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2016

United Nations Development Program (UNDP) sejak tahun 1990 mempublikasikan *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menyampaikan bahwa pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan manusia dalam arti luas, bukan hanya dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi. Indikator kesenjangan pembangunan dan pemerinkatan yang baik harus memasukkan variabel kesehatan dan pendidikan dalam pengukuran kesejahteraan yang tertimbang, dan bukan hanya melihat tingkat pendapatan saja.

IPM adalah sebuah indikator komposit yang merupakan ukuran gabungan dari beberapa indikator tunggal, karena indikator tunggal seringkali dirasakan kurang tepat untuk mengukur atau menerangkan beberapa gejala sekaligus. IPM mengukur capaian umum suatu daerah dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu panjangnya usia (diukur dengan angka harapan hidup saat lahir), pengetahuan (diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan kelayakan hidup (diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan). Menurut Santika (2014) tingkat pembangunan manusia dapat mempengaruhi kemampuan penduduk dalam mengelola berbagai sumber daya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Data Indeks Pembangunan Manusia untuk Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2016 dapat dilihat pada Tabel 4.2. Berdasarkan data tersebut, IPM Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2001-2016 mengalami pertumbuhan sebesar 13,35%. Data tersebut berfluktuatif namun tetap menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2010 dimana terjadi penurunan dengan persentase sebesar 0.47%. Dari nilai IPM

tahun 2016 yang menunjukkan angka 69.76%, dapat diklasifikasikan termasuk dalam kategori IPM sedang.

Tabel 4.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan IPM
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2016

Tahun	IPM (%)	Pertumbuhan%
2001*	61.54	-
2002*	61.86	0.51
2003*	62.67	1.32
2004*	63.11	0.70
2005*	63.69	0.92
2006*	64.48	1.24
2007*	65.09	0.94
2008*	65.59	0.77
2009*	66.31	1.10
2010**	66.00	-0.47
2011**	66.65	0.98
2012**	67.26	0.92
2013**	67.92	0.97
2014**	68.49	0.84
2015**	69.15	0.96
2016**	69.76	0.88

Sumber : *= Diolah oleh penulis

**=BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2017

4.3 Analisis Hasil

Hasil pengolahan data yang dilakukan menggunakan *software* IBM SPSS AMOS versi 22. Seperti pada bab tentang metodologi penelitian, bahwa penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan

ketimpangan pembangunan antardaerah terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan menggunakan metode analisis jalur.

4.3.1 Uji Normalitas

Proses Analisis dimulai dari uji distribusi normal, kemudian uji kesesuaian model dan pengujian hipotesis penelitian. Uji Normalitas merupakan pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai penyebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Uji Normalitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *critical ratio skewness* (kecondongan) dan nilai *critical ratio kurtosis* (tinggi-datar). Data dianggap memenuhi syarat distribusi normal jika *critical ratio skewness* dan nilai *critical ratio kurtosis* <2,58 pada tingkat signifikansi 0,01(1%) (Ghozali, 2008).

Tabel 4.3
Assesment of Normality

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
X1	4.080	8.870	-.267	-.435	-.523	-.427
X2	.574	.697	-1.162	-1.897	.176	.144
Y	61.540	69.760	-.034	-.055	-1.089	-.890
Multivariate					-.998	-.364

Sumber: Hasil olah data (IBM SPSS Amos 22), 2017

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil pengujian normalitas data menunjukkan nilai *critical ratio skewness* dan nilai *critical ratio kurtosis* lebih kecil dari *cut off* yang dipersyaratkan sebesar <2,58. Berarti dapat dikatakan bahwa distribusi data dalam penelitian ini memenuhi kriteria distribusi normal dan layak digunakan.

4.3.2 Uji Kesesuaian

Dari uji kesesuaian model (Lampiran 3) didapatkan bahwa pengujian *Goodness of Fit* berdasarkan χ^2 *Chi Square* menunjukkan nilai 0,000 (sekecil

mungkin), dengan nilai p 0,000 ($<0,05$) dan RMSEA 0,816 ($>0,05$) berarti tidak memenuhi kriteria berdasarkan *Chi Square* dan RMSEA. Lalu dilihat menggunakan indikator lain yaitu GFI 1,000 dan CFI 1,000 sehingga model masih dapat dikatakan memenuhi kriteria *Goodness fit of model*. Sedangkan besarnya nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai *Squared Multiple Correlations* (R^2) sebesar 0.720, yang berarti variabel Indeks Pembangunan Manusia dapat dijelaskan oleh Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Antardaerah sebesar 72% sedangkan 28% adalah variabel lain yang tidak diteliti.

4.3.3 Pengujian Hipotesis

Dengan menggunakan program Amos, maka diagram jalur yang dibuat dikonversi ke persamaan struktural, kemudian dilakukan analisis berdasarkan nilai estimasi dan probabilitas (signifikansi) variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Antardaerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2016. Berikut tabel ringkasan *regression weights* analisis jalur yang menunjukkan pengaruh dan besaran nilai probabilitas (signifikansi) hubungan antarvariabel:

Tabel 4.4
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan
Antardaerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia
di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2016

Variabel	Koefisien	Koefisien Standardized	Standar Error	C.R.	P. Value	Keterangan
X1 → X2	0.023	0.777	0.005	4.774	0.001	Signifikan
X1 → Y	0.884	0.433	0.442	1.998	0.046	Signifikan
X2 → Y	31.500	0.467	14.625	2.154	0.031	Signifikan

Sumber: Hasil olah data (IBM SPSS Amos 22), 2017

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan (Tabel 4.4) nilai koefisien *standardized* pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan

antardaerah sebesar 0,777 dan nilai probabilitas sebesar $0,001 < 0,05$, ini berarti pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antardaerah. Setiap kenaikan/penurunan 1% pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan kenaikan/penurunan pula sebesar 0,777% pada ketimpangan pembangunan antardaerah.

Nilai koefisien *standardized* pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 0.433 dan nilai probabilitas sebesar $0,046 < 0,05$, ini berarti pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Setiap kenaikan/penurunan 1% pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan kenaikan/penurunan pula sebesar 0,433% pada indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, nilai koefisien *standardized* ketimpangan pembangunan antardaerah terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 0.467 dan nilai probabilitas sebesar $0,031 < 0,05$, ini berarti ketimpangan pembangunan antardaerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Setiap kenaikan/penurunan 1% ketimpangan pembangunan antardaerah akan mengakibatkan kenaikan/penurunan pula sebesar 0,467% pada indeks pembangunan manusia.

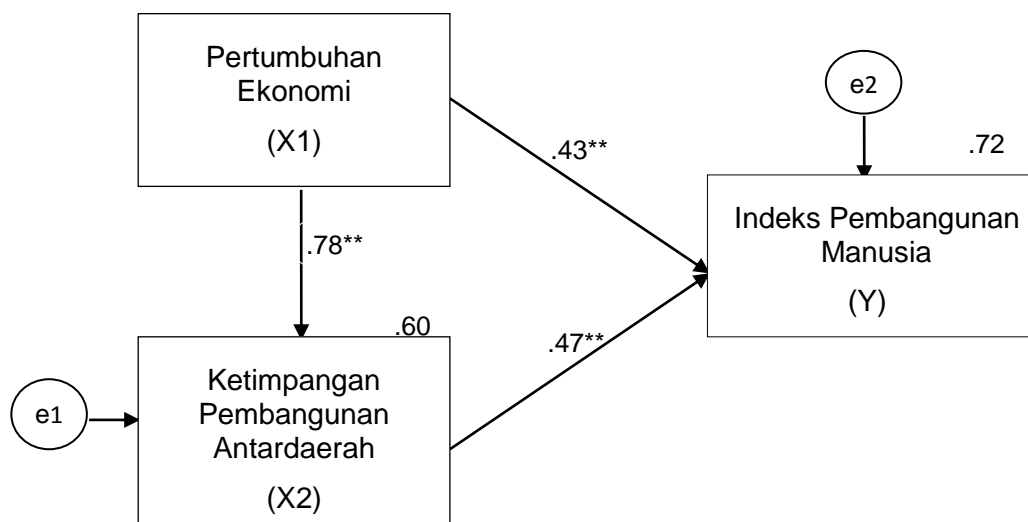
Tabel 4.5
Hasil Estimasi Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung
(Standardized Coefficient)

Variabel	Pengaruh Langsung (Direct Effects)		Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effects)
	X1	X2	
X2	0.777	0.000	0.000
Y	0.433	0.467	0.363

Sumber: Hasil olah data (IBM SPSS Amos 22), 2017

Nilai koefisien *standardized* (Tabel 4.5) pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia melalui ketimpangan pembangunan antardaerah sebesar 0,363. Ini berarti bahwa secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Mengindikasikan bahwa setiap kenaikan/penurunan pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan kenaikan/penurunan pula pada indeks pembangunan manusia.

Hasil dari interpretasi data tersebut jika dikembalikan pada kerangka konseptual, maka akan terlihat seperti pada Gambar 4.3.



Keterangan Gambar:

** : Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Gambar 4.3
Kerangka Konseptual dengan Hasil Estimasi

Gambar 4.3 Memberikan informasi mengenai koefisien yang diperoleh dari hasil regresi yang telah dilakukan (Lampiran 3). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan

Pembangunan Antardaerah

Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi dipresentasikan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan 2010 selama tahun 2001-2016. Sedangkan ketimpangan pembangunan antardaerah dihitung berdasarkan formula Indeks Williamson yang meliputi PDRB perkapita dan jumlah penduduk di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu tersebut.

Hasil perhitungan secara langsung menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan antardaerah. Hal ini bertolak belakang dengan hipotesis yang tersedia. Dapat diinterpretasikan bahwa jika pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan meningkat maka hal ini dapat mendorong peningkatan ketimpangan pembangunan antardaerah yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, jika pertumbuhan ekonomi menurun maka ketimpangan pembangunan antardaerah juga bisa ikut menurun. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Qiao, dkk (2007) yang menemukan adanya *trade-off* atau hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan regional.

Hal ini mengindikasikan bahwa di daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah terjadi ketimpangan pembangunan yang juga tinggi. Sesuai dengan pernyataan Myrdal (1976) efek *backwash* adalah suatu efek ketika daerah yang mengalami kemajuan akan semakin maju dan daerah yang mengalami ketertinggalan akan semakin tertinggal, karena perbedaan dari modal, tenaga kerja, keterampilan, teknologi, dan fasilitas publik yang berbeda pada tiap-tiap daerah. Dari segi modal, ketersediaan modal di daerah maju

pasti lebih banyak karena dengan perkembangan ekonomi yang pesat jelas terdapat perputaran uang yang tinggi sehingga meningkatkan pendapatan dari masyarakat di daerah tersebut. Pada daerah tertinggal dengan perekonomian yang lesu maka pendapatan masyarakat akan kecil sehingga tabungan masyarakat juga kecil yang mengakibatkan jumlah modal yang tersedia juga kecil, bahkan tidak menutup kemungkinan modal yang sedikit tersebut akan dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi yang ada di daerah maju.

Selain itu faktor penyebab terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan semakin membuat ketimpangan pembangunan wilayah juga semakin tinggi adalah terjadinya pergeseran sektor primer ke sektor sekunder (Lampiran 5 Tabel 7.3). Chenery dan Taylor dalam Sukirno (1995) memperlihatkan corak perubahan struktur ekonomi yang berimbas pada terjadinya perbedaan pendapatan antara daerah satu dengan yang lain adalah dikarenakan *comparative advantage* yang dimiliki tiap daerah yang berbeda-beda. Daerah yang memiliki keunggulan sektor primer akan memproduksi barang primer dan mengimpor barang sekunder, sedangkan daerah yang memiliki keunggulan dalam sektor sekunder akan memproduksi barang sekunder dan mengimpor barang primer. Kemudian dengan sifat alami manusia yang apabila terjadi peningkatan pendapatan maka proporsi pembelian barang primer akan menurun dan proporsi pembelian barang sekunder akan meningkat, hal ini yang mengakibatkan perbedaan pendapatan antardaerah yang semakin meningkat.

4.4.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan

Manusia

Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi dipresentasikan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan

2010 selama tahun 2001-2016. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia dipresentasikan dengan nilai IPM di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2001-2016.

Hasil perhitungan secara langsung menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil ini mendukung hipotesis yang tersedia. Dapat diinterpretasikan bahwa jika pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan meningkat maka hal ini dapat pula mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mirza (2012), bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan positif terhadap IPM, yang berarti pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan meningkatnya pendapatan, maka kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya menjadi lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam bentuk pendapatan masyarakat mulai meningkat. Pertumbuhan PDB akan mendorong masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik (Lilis dan Yohana, 2012). Pada tingkat makro, distribusi peningkatan pendapatan dari pertumbuhan ekonomi juga akan memiliki dampak yang kuat pada pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya diarahkan lebih kemasyarakat miskin akan memiliki dampak yang lebih besar pada pembangunan manusia (Ranis, 2004).

Sedangkan, dari hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia melalui ketimpangan pembangunan

antardaerah. Hasil ini mendukung hipotesis yang tersedia. Dapat diinterpretasikan bahwa jika pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan meningkat maka hal ini dapat mengakibatkan peningkatan indeks pembangunan manusia. Begitupun sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan menurun, maka indeks pembangunan manusia pun ikut menurun. Ketimpangan pembangunan antardaerah merupakan variabel mediasi dalam pengaruh ini, yang dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan termasuk dalam kategori ketimpangan tinggi.

Menurut Midgley (1995), menjelaskan bahwa pembangunan sosial merupakan pendekatan pembangunan secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan sosial tidak dapat berjalan baik tanpa adanya pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi tidaklah bermakna kecuali diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosial dari populasi sebagai suatu kesatuan. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja.

Melihat struktur PDRB dari sisi pengeluaran (Lampiran 5 Tabel 7.4) pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2012-2016 adalah pada konsumsi rumah tangga dengan kontribusi lebih dari 50%. Sektor investasi (PMTB) sebagai sektor yang penting bagi pertumbuhan daerah berkontribusi sebesar 33,80% pada PDRB ADHB dan 35,11% pada PDRB ADHK 2010. Investasi merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi bagi suatu wilayah.

Konsumsi pemerintah yang juga merupakan salah satu sektor penting hanya berkontribusi tidak lebih dari 10%. Investasi pemerintah yang umumnya merupakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana publik memiliki peran yang tidak tergantikan dibandingkan peran swasta. Peran pemerintah semakin penting di daerah-daerah relatif tertinggal, dimana tingkat investasi swasta masih rendah. Selain investasi fisik, investasi modal manusia juga merupakan hal penting dalam pembangunan, yang nantinya akan mampu membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas. Pemerintah harus mampu menjaga pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, sekaligus meningkatkan mutu pelayanan publik terutama dibidang pendidikan dan kesehatan.

Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan salah satu hal yang saling berkaitan dan harus searah agar tercipta keberhasilan pembangunan. Capaian pertumbuhan ekonomi dan diimbangi pemerataan distribusi pendapatan serta alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan dapat diinvestasikan untuk pembangunan manusia.

4.4.3 Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antardaerah terhadap

Indeks Pembangunan Manusia

Dalam penelitian ini Ketimpangan Pembangunan Antardaerah dihitung berdasarkan formula Indeks Williamson yang meliputi PDRB perkapita dan jumlah penduduk di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2001-2016. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia dipresentasikan dengan nilai IPM di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu tersebut.

Hasil perhitungan secara langsung menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antardaerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil ini menolak hipotesis yang tersedia dan tidak sejalan dengan kebanyakan studi empiris, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Sasana (2009) yang menyimpulkan bahwa kesenjangan ekonomi antardaerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan manusia.

Ketimpangan antardaerah akan mengakibatkan timpangnya pertumbuhan pada daerah maju dan daerah tertinggal. Daerah maju dengan pertumbuhan yang pesat akan meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tersebut dan mendorong masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik (Lilis dan Yohana, 2012).

Melihat kondisi Sulawesi Selatan (Lampiran 4 Gambar 7.1), daerah maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Dengan pendapatan yang lebih tinggi maka masyarakat dan pemerintah dapat mengeluarkan dana yang lebih besar untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan, dan dengan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi akan lebih mudah dicapai. Itulah mengapa dalam keadaan timpang, perekonomian daerah maju akan terus bertumbuh dan indeks pembangunan manusianya akan terus meningkat. Sehingga memberikan kontribusi paling dominan dalam perhitungan indeks pembangunan manusia provinsi meskipun hanya satu daerah. Sedangkan, daerah yang tingkat pendapatannya tinggi tetapi standar pendidikan dan kesehatannya rendah adalah daerah yang tumbuh tapi tidak berkembang (Todaro, 2009).

Efek *backwash* yang dikemukakan Myrdal (1976) juga disebabkan karena adanya perbedaan fasilitas publik pada tiap-tiap daerah. Fasilitas publik yang dimaksud seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas jalan, dll. Perbedaan fasilitas publik yang tersedia antara daerah maju dan tertinggal akan mengakibatkan perpindahan penduduk, tentunya masyarakat akan mencari tempat tinggal yang memiliki fasilitas publik yang lebih lengkap, selain itu dengan padatnya jumlah penduduk di daerah maju dan permintaan yang tidak memadai maka kekurangan fasilitas publik tersebut akan menjadi kesempatan dari sektor swasta untuk menyediakannya dengan pertimbangan ekonomi yang menguntungkan. Dengan kondisi demikian maka daerah maju akan semakin lengkap fasilitas publik, dan daerah yang tertinggal akan semakin berkurang penduduknya sehingga pemanfaatan fasilitas publik di daerah tersebut pun akan berkurang.

Dengan demikian, kesehatan dan pendidikan juga dapat dipandang sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang vital. Untuk itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diimbangi dengan pemerataan diperlukan agar kesejahteraan masyarakat dalam hal ini pembangunan manusia dapat tercapai.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan antardaerah di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2001-2016 adalah positif dan signifikan. Mengindikasikan bahwa terdapat hubungan kuat yakni, setiap kenaikan/penurunan pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan kenaikan/penurunan pula pada ketimpangan pembangunan antardaerah.
2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2001-2016 adalah positif dan signifikan. Mengindikasikan bahwa terdapat hubungan kuat yakni, setiap kenaikan/penurunan pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan kenaikan/penurunan pula pada indeks pembangunan manusia.
3. Pengaruh ketimpangan pembangunan antardaerah terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2001-2016 adalah positif dan signifikan. Mengindikasikan bahwa terdapat hubungan kuat yakni, setiap kenaikan/penurunan pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan kenaikan/penurunan pula pada indeks pembangunan manusia.
4. Pengaruh tidak langsung pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia melalui ketimpangan pembangunan antardaerah di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2001-2016 adalah positif. Mengindikasikan bahwa setiap kenaikan/penurunan pertumbuhan ekonomi

akan mengakibatkan kenaikan/penurunan pula pada indeks pembangunan manusia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunan diharapkan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga memprioritaskan aspek pemerataan serta pembangunan manusia demi tercapainya masyarakat yang sejahtera.
2. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkecil ketimpangan pembangunan antardaerah perlunya pengembangan wilayah untuk memperbanyak titik-titik pertumbuhan (*growth center*) baru sehingga tidak menyebabkan timbulnya daerah pusat dan daerah terbelakang serta sektor yang lebih dominan dibanding sektor yang lain.
3. Dalam programnya, pemerintah diharapkan lebih intensif melakukan pembangunan dengan berbasis manusia (*human development*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alesina, A and D. Rodrik. 1994. *Distributive Policies and Economic Growth. Quarterly Journal of Economics*.
- Arsyad, Lincolin. 2002. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- Awandari dkk. 2016. *Pengaruh Infrastruktur, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Kesempatan Kerja*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2015. *Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 2015*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 5 No. 12.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2017*. Makassar: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
- Brata, Aloysius Gunadi. 2005. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, dan Dstribusi Pendapatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. Yogyakarta : Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya.
- Elizabeth A, Stanton. 2007. *The Human Development Index: A History. Working Paper Global Development and Environment Institute Tufts University*.
- Ghozali, Imam. 2008. *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos 16.0*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Harun, Lukman dan Ghozali Maski. 2012. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniasih, Erni Panca. 2013. *Ketimpangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian terhadap Hipotesis Kuznet*. Jurnal Eksos Universitas Tanjungpura Pontianak, Vol. 9, No. 1.
- Lilis Setyowati dan Yohana Kus Suparwati. 2012. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jawa Tengah.

- Midgley, James. 1995. *Social Development: the Developmental Perspective in Social Welfare*. London: SAGE Publication Ltd.
- Mirza, Denni Sulistio. 2012. *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah 2006-2009*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, EDAJ. Vol. 1.
- Myrdal, Gunnar. 1976. *Bangsa-Bangsa Kaya dan Miskin*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Pressman, Steven. 2000. *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*, Terjemahan Edisi Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qiao. B, Jorge M-V, and Yongsheng. 2007. *The Tradeoff Between Growth and Equality in Decentralization policy: China's experience*. Journal of Development University of Finance and Economics, Beijing, China. Hal 112-128.
- Ranis, Gustav. 2004. *Human Development and Economic Growth. Center Discussion Paper of Yale University*. No. 887.
- Razak, Rahman Abd. 2009. *Esensi Pembangunan Ekonomi Daerah*. Makassar: Mala Cipta Litera.
- Ristiardani. 2011. *Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Perkapita dan Disparitas Pendapatan antar Wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan*. Tesis Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Universitas Indonesia.
- Santika, Lilya. 2014. *Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali*. E-Jurnal EP Unud.
- Sarwono, Jonathan. 2007. *Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis Dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sasana, Hadi. 2009. *Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Vol 1: hal, 50-69.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Sjafrizal. 2014. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Solihin, Dadang. 2012. *Pengelolaan Keuangan di Era Otonomi Daerah [Jurnal Ekonomi]*.
- Sukirno, Sadono. 1995. *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan)*. Jakarta: LPFE UI.
- Sutarno dkk. (2003). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas 1993-2000*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8 No. 2, 97-110.

- Tambunan, T.T.H. 2003. *Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P. and Smith Stephen C. 2003. *Economic Development*. United Kingdom: Pearson Education Limited.
- Todaro, Michael P. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Todaro, Michael P. 2009. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Wibowo, Arif. 2005. *Pengantar Analisis Jalur*. Surabaya: LPPM Unair Surabaya.
- Yasa, I Komang dkk. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol. 8 No.1. Bali: Universitas Udayana.

L A M P I R A N

Lampiran 1 : Indeks Williamson

Tabel 7.1
Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2001-2016

Tahun	PDRB/Kapita (Juta Rp)	$\sum(y_i - \bar{y})^2 \cdot (f_i / \sum f_i)$	\bar{y}	IW
2001	12,427.74	41,523,305,105,524	11,233,780	0.5736
2002	12,868.35	45,327,487,414,577	11,573,433	0.5817
2003	13,207.76	53,539,210,088,768	11,810,472	0.6195
2004	15,029.75	83,667,812,375,158	14,161,204	0.6459
2005	15,964.91	89,200,505,083,658	14,655,632	0.6444
2006	16,558.96	94,390,168,023,766	15,229,467	0.6379
2007	17,653.22	114,396,800,403,842	16,007,127	0.6682
2008	18,716.00	128,122,897,013,938	16,442,679	0.6884
2009	19,717.03	140,767,948,876,278	17,134,371	0.6924
2010	21,001.30	160,118,942,362,267	18,167,593	0.6965
2011	22,882.23	178,343,467,874,486	19,664,605	0.6791
2012	24,729.80	207,453,396,695,059	21,100,926	0.6826
2013	26,059.98	231,363,531,290,515	22,208,457	0.6849
2014	27,808.75	258,262,745,418,777	23,689,201	0.6784
2015	29,539.12	289,840,965,107,634	25,118,485	0.6778
2016	31,444.51	324,151,605,542,735	26,648,906	0.6756

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2017 (diolah)

Lampiran 2 : IPM Metode Baru (2014)

Tabel 7.2
IPM Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2001-2016

Tahun	AHH	Indeks Kesehatan	HLS	RLS	Indeks Pendidikan	Pengeluaran per Kapita	Indeks Pengeluaran	IPM
*2001	68.71	0.7494	8.94	6.79	0.4746	8599000	0.6552	61.54
*2002	68.60	0.7477	9.23	6.80	0.4830	8600000	0.6553	61.86
*2003	68.85	0.7515	9.52	6.91	0.4948	8788000	0.6619	62.67
*2004	68.70	0.7492	9.81	6.85	0.5009	9017000	0.6697	63.11
*2005	68.73	0.7497	10.10	7.00	0.5140	9041000	0.6706	63.69
*2006	69.20	0.7569	10.39	7.17	0.5277	9063000	0.6713	64.48
*2007	69.40	0.7600	10.69	7.23	0.5378	9164000	0.6747	65.09
*2008	69.60	0.7631	10.98	7.23	0.5459	9246000	0.6774	65.59
*2009	69.80	0.7662	11.27	7.41	0.5600	9315000	0.6797	66.31
**2010	68.93	0.7528	11.47	7.29	0.5616	9331000	0.6802	66.00
**2011	69.12	0.7557	11.82	7.33	0.5727	9459000	0.6844	66.65
**2012	69.31	0.7586	12.16	7.37	0.5834	9560000	0.6876	67.26
**2013	69.50	0.7615	12.52	7.45	0.5961	9632000	0.6899	67.92
**2014	69.60	0.7631	12.90	7.49	0.6080	9723000	0.6928	68.49
**2015	69.80	0.7662	12.99	7.64	0.6155	9992000	0.7011	69.15
**2016	69.82	0.7665	13.16	7.75	0.6239	10281000	0.7098	69.76

Ket: *: diolah oleh penulis
 **: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2017

Lampiran 3 : Hasil IBM SPSS Amos 22

Assessment of normality (Group number 1)

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
X1	4.080	8.870	-.267	-.435	-.523	-.427
X2	.574	.697	-1.162	-1.897	.176	.144
Y	61.540	69.760	-.034	-.055	-1.089	-.890
Multivariate					-.998	-.364

Estimates (Group number 1 - Default model)

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)

Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
X2 <--- X1	.023	.005	4.774	***	par_1
Y <--- X1	.884	.442	1.998	.046	par_2
Y <--- X2	31.500	14.625	2.154	.031	par_3

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate
X2 <--- X1	.777
Y <--- X1	.433
Y <--- X2	.467

Variances: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
X1	1.480	.541	2.739	.006	par_4
e1	.001	.000	2.739	.006	par_5
e2	1.725	.630	2.739	.006	par_6

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)

	Estimate
X2	.603
Y	.720

Total Effects (Group number 1 - Default model)

	X1	X2
X2	.023	.000
Y	1.624	31.500

Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model)

	X1	X2
X2	.777	.000
Y	.796	.467

Direct Effects (Group number 1 - Default model)

	X1	X2
X2	.023	.000
Y	.884	31.500

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model)

	X1	X2
X2	.777	.000
Y	.433	.467

Indirect Effects (Group number 1 - Default model)

	X1	X2
X2	.000	.000
Y	.740	.000

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)

	X1	X2
X2	.000	.000
Y	.363	.000

Model Fit Summary**CMIN**

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	6	.000	0		
Saturated model	6	.000	0		
Independence model	3	32.959	3	.000	10.986

RMR, GFI

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI
Default model	.000	1.000		
Saturated model	.000	1.000		
Independence model	.982	.444	-.113	.222

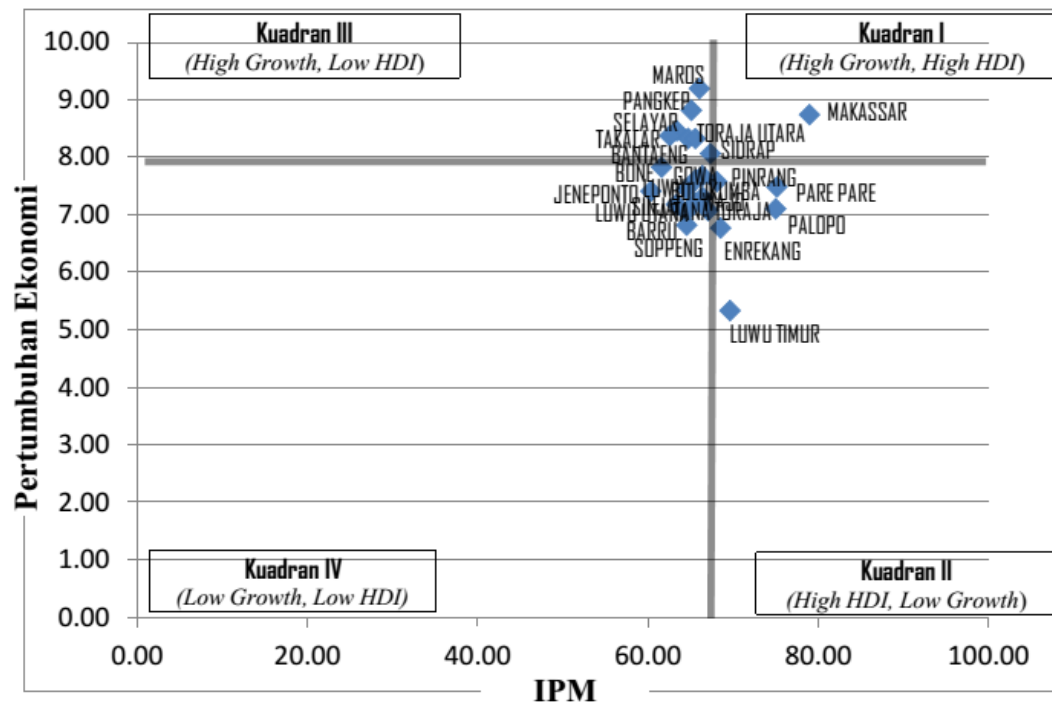
Baseline Comparisons

Model	NFI Delta1	RFI rho1	IFI Delta2	TLI rho2	CFI
Default model	1.000		1.000		1.000
Saturated model	1.000		1.000		1.000
Independence model	.000	.000	.000	.000	.000

RMSEA

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Independence model	.816	.579	1.078	.000

Lampiran 4 : Tipologi Klassen



Gambar 7.1
Kondisi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Kriteria Tipologi Klassen, 2010-2016 (BPS 2017, diolah)

Lampiran 5 : PDRB Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 7.3
Struktur Rata-rata PDRB menurut Lapangan Usaha tahun 2012-2016

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Presentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK (2010)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22.82	21.67
2	Pertambangan dan Penggalian	6.61	6.16
3	Industri Pengolahan	13.80	14.11
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.12	0.13
6	Konstruksi	12.16	11.85
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.06	13.96
8	Transportasi dan Pergudangan	4.08	3.76
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.36	1.36
10	Informasi dan Komunikasi	4.96	6.22
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.67	3.50
12	Real Estate	3.86	3.64
13	Jasa Perusahaan	0.44	0.43
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.70	4.57
15	Jasa Pendidikan	5.20	5.38
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.86	1.89
17	Jasa lainnya	1.26	1.27
		100.00	100.00

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2017.

Tabel 7.4
Struktur Rata-rata PDRB menurut Pengeluaran tahun 2012-2016

No.	Komponen Pengeluaran	Distribusi Presentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK (2010)
1	Konsumsi Rumah Tangga	50.90	50.16
2	Konsumsi LNPRT	1.12	1.09
3	Konsumsi Pemerintah	9.84	9.42
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	33.80	35.11
5	Perubahan Inventori	1.20	1.31
6	Ekspor Luar Negeri	5.86	6.31
7	Impor Luar Negeri	4.13	3.96
8	Net Ekspor Antar Daerah	-6.84	-7.36
		100.00	100.00

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2017.

Tabel 7.5
Rata-Rata Kontribusi PDRB ADHK 2010 menurut Kabupaten Kota
Tahun 2014-2016

Wilayah Sulawesi Selatan	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)			Rata-rata Kontribusi (%)
	2014	2015	2016	
Kepulauan Selayar	2503.35	2723.95	2924.26	1.08
Bulukumba	6413.70	6773.59	7241.16	2.70
Bantaeng	3819.28	4072.58	4373.65	1.62
Jeneponto	4773.64	5085.25	5513.69	2.03
Takalar	4548.62	4930.88	5404.58	1.97
Gowa	9720.17	10379.84	11172.27	4.13
Sinjai	5035.30	5414.78	5802.60	2.15
Maros	10066.82	10930.22	11970.40	4.35
Pangkajene Kepulauan	12419.76	13408.20	14513.11	5.33
Barru	3474.78	3694.09	3919.04	1.47
Bone	14821.38	16050.61	17504.82	6.39
Soppeng	4882.19	5131.02	5554.05	2.06
Wajo	10341.08	11069.65	11620.82	4.37
Sindereng rappang	6110.20	6597.66	7191.28	2.63
Pinrang	8940.48	9677.08	10404.18	3.83
Enrekang	3389.15	3622.71	3899.61	1.44
Luwu	6934.03	7437.12	8031.64	2.96
Tana Toraja	3198.12	3416.76	3670.27	1.36
Luwu Utara	5739.51	6121.92	6580.62	2.44
Luwu Timur	13748.02	14632.06	14868.56	5.72
Toraja Utara	3510.36	3779.01	4089.33	1.50
Makassar	82592.92	88750.16	95836.98	35.30
Pare-pare	3615.90	3842.88	4106.87	1.53
Palopo	3889.24	4140.24	4429.23	1.65
PDRB	234488.00	251682.26	270623.02	100.00

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2017.

Lampiran 6 : Biodata**BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Nurul Izza

Tempat, Tanggal Lahir : Bulukumba, 23 Desember 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : BTN Bumi Zarindah Blok J No. 11, Gowa

Nomor Hp : 082259179002

Alamat *E-mail* : izzanurul88@gmail.com

**Riwayat Pendidikan**

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. SD Negeri 32 Barabba | Tahun 2001-2007 |
| 2. SMP Negeri 2 Bulukumba | Tahun 2007-2010 |
| 3. SMK Negeri 1 Bulukumba | Tahun 2010-2013 |
| 4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNHAS | Tahun 2013-Sekarang |

Pengalaman Organisasi

1. Koordinator Departemen Pengaderan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi (HIMAJIE) FEB-Unhas periode 2016-2017
2. Sekretaris Umum Senat Mahasiswa FEB-Unhas periode 2015-2016
3. Wakil Ketua OSIS SMK Negeri 1 Bulukumba periode 2011-2012

Prestasi

1. Peserta Terbaik III Linear Group HIMAJIE (2013)
2. Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah *Eccents 7th* HIMA EP Universitas Airlangga (2014)
3. Juara II Lomba Cipta Puisi Festival Kreativitas Pemuda UKM Pantun dan Seni Kreatif Unhas (2015)

Makassar, 14 November 2017

Nurul Izza